

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Politisasi birokrasi merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi pada negara berkembang dan menjadi sebuah strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah. Fenomena ini terjadi ketika para pejabat yang memegang jabatan tinggi atau jabatan tingkat atas melakukan mobilisasi terhadap bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar dan diharapkan nantinya akan mampu merebut kekuasaan tersebut. Konstelasi kekuasaan seperti ini akan menjadi penyebab birokrasi yang tidak mempunyai akuntabilitas kepada masyarakat<sup>1</sup>. Politisasi birokrasi pada dasarnya berangkat dari kajian keilmuan tentang politik birokrasi (*bureaucratic politics*).

Birokrasi pada saat ini digambarkan sebagai birokrasi modern yang di dalamnya terdapat nilai-nilai ideal. Birokrasi pada saat ini juga sudah menunjukkan manajemen yang tersistematis dalam proses penyelenggaraannya<sup>2</sup>. Pembaharuan-pembaharuan terhadap birokrasi yang dilakukan melalui program Reformasi Birokrasi pada dasarnya memang harus terus ditingkatkan guna mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akan tetapi, pada sisi yang lainnya hal ini menjadi sangat sulit untuk melihat standar ideal dalam birokrasi. Hal ini dikarenakan, kita hanya dapat melihat sistem terluar dari birokrasi saja

---

<sup>1</sup> Rizki Muharlin Rayadi dan Erman. 2014. "Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1 (1) hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

atau dapat dikatakan bahwasanya kita melihat birokrasi yang pada realitanya hanya fokus pada pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditentukan, seperti pelayanan surat-surat kepada masyarakat, acara-acara seremonial, pemberian bantuan dan sebagainya. Padahal jika melihat secara keseluruhan, banyak hal-hal yang jauh dari idealisme birokrasi itu sendiri, seperti netralitas, impersonalitas, akuntabilitas, bahkan politisasi birokrasi<sup>3</sup>.

Dalam *The Political System of Empires I* (1963), S.N. Eisestadt mengklasifikasikan birokrasi menurut keterlibatannya dalam proses politik<sup>4</sup>, yakni:

1. Birokrasi berorientasi sebagai abdi bagi penguasa dan strata sosial yang utama;
2. Sepenuhnya tunduk pada penguasa;
3. Bersifat otonom dan berorientasi pada keuntungan sendiri;
4. Berorientasi pada diri sendiri, tetapi secara umum juga melayani negara (*polity*) ketimbang pada strata tertentu.

Para ahli memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan hubungan antara politik dan birokrasi ini. Pertama, mereka yang cenderung untuk memisahkan Ilmu Politik dan Administrasi Publik. Mereka yang memegang pemahaman ini memiliki pendapat bahwa seharusnya antara politik dan administrasi itu harus dipisahkan, karena politik dan administrasi tidak bisa dicampurkan, begitupun sebaliknya. Kedua, mereka yang memiliki pemahaman untk

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

menyatukan politik dan administrasi. Mereka memiliki argumen bahwa jika ingin membahas persoalan administrasi atau birokrasi maka harus mempelajari politik, dan juga sebaliknya. Artinya, ketika seseorang ingin mempelajari Teori Politik maka harus paham Teori Administrasi Publik terlebih dahulu, maupun sebaliknya<sup>5</sup>.

Pada dasarnya, politik memegang erat kaitannya dengan kekuasaan (*power*) ataupun perebutan kekuasaan. Politik itu sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah sarana untuk memaksakan kehendak satu pihak kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Seseorang yang berpolitik, maka sudah tentu tujuannya adalah memperoleh kekuasaan.

Birokrasi sangat rentan terlibat dalam politik praktis, terkhusus pada masa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Keterlibatan birokrasi dalam politik praktis biasanya dilakukan dengan menjadi anggota tim sukses salah satu calon dan melakukan mobilisasi terhadap bawahan dan massa di sekitarnya untuk mendukung calon tersebut.

Pejabat politik (*political leadership*) dan birokrasi memiliki hubungan yang konstan antara fungsi kontrol dan dominasi. Pada pola hubungan semacam ini, akan senantiasa memunculkan suatu persoalan mengenai siapa yang mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin, dan mendominasi siapa (Carino: 1994 dalam Thoha: 2011).

---

<sup>5</sup> Wayu Eko Yudiatmaja. 2015. "Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. Vol. 3 (1) hlm. 11.

Pasca pemilihan kepala daerah keinginan merombak pejabat dan pegawai di lingkup pemerintahan daerah bisa meningkat. Mutasi Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah dinamika dalam ruang lingkup manajemen kepegawaian pada pemerintah. Manajemen kepegawaian ini atau proses mutasi ini yang sering dilakukan pemerintah daerah cenderung akan menimbulkan fenomena profesional maupun politis.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah yang tentunya memiliki dinamika, maka dalam birokrasi dinamika ini dapat terlihat dalam bentuk sebuah proses penataan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Masudi<sup>6</sup>, mutasi merupakan perpindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Aparatur Sipil Negara dapat berpindah dari jabatan fungsional ke jabatan struktural ataupun dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, baik di instansi pusat maupun instansi daerah dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen yang sangat penting guna melakukan manajemen terhadap pegawai dalam birokrasi yang sangat penting untuk dilakukan dengan menjunjung tinggi kompetensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Kepentingan yang politis dan aspek subjektifitas seringkali mendominasi dalam setiap pengisian jabatan struktural ASN maupun penataan pegawai dalam sebuah birokrasi. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan birokrasi sebagai sebuah sarana untuk mengeksitensikan semangat meraih dukungan politik pada

---

<sup>6</sup> Hidayati, R. N. 2012. "Mutasi Aparatur Pemerintah dan Kepentingan Politik: Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari Qosim". *Jurnal Politik Muda*. Vol. 2 (1) hlm. 186–193.

pemilihan kepala daerah maupun pasca pemilihan kepala daerah dari masyarakat ataupun kelompok etnisnya<sup>7</sup>. Hal inilah yang mengakibatkan publik menjadi memiliki pandangan negatif publik terhadap proses mutasi yang mana bahwasanya menempatkan seorang ASN dalam jabatan strukturalnya lebih ditentukan oleh faktor dukung atau tidak mendukung pejabat politik yang berkontestasi dan hal ini juga berkaitan dengan kultural yang ada dalam masyarakat Indonesia<sup>8</sup>.

Pasca Pemilihan Kepala Daerah berlangsung, kegiatan mutasi ASN justru dilakukan dengan cara yang jauh dari prinsip profesionalitas dan proporsionalitas sebab adanya keterlibatan politik aparatur birokrasi<sup>9</sup>. Hal tersebut seolah menjadi hukuman terhadap indikasi keterlibatan pejabat tersebut dalam momentum pemilihan kepala daerah.

Pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2020, Kabupaten Bungo salah satu Kabupaten yang masuk dalam daftar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 kemarin. Pemilihan kepala daerah tersebut diadakan untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo periode 2021-2024. Pemilihan kepala daerah tersebut dimenangkan oleh pasangan petahana Mashuri-Safrudin Dwi Apriyanto nomor urut 2. Fenomena yang menarik

<sup>7</sup> Salim, K. 2015. "Politik Identitas di Maluku Utara (Identity Politic in Maluku Utara)". *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*. Vol. 11 (2) hlm. 1667–1678.

<sup>8</sup> Hasan, N. 2012. "Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum*. Vol. 28 (2) hlm. 1073–1087.

<sup>9</sup> Romli, O. 2016. "Tanpa Incumbent, Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi Pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Dengan Tahun 2015)". *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 (1) hlm. 132–159.

pasca pemilihan kepala daerah serentak 2020 tersebut adalah ketika Bupati Bungo terpilih, Mashuri melakukan mutasi terhadap 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai fenomena politisasi birokrasi yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kabupaten Bungo.

Hubungan politik-birokrasi di Indonesia pada saat ini menjadi wacana yang menarik untuk dibahas. Fenomena politisasi birokrasi sejatinya dapat dilihat pada konteks pertarungan atau kontestasi politik di Indonesia. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum bagi para politisi yang bertarung dalam perebutan sebuah kekuasaan. Persoalan politisasi birokrasi telah menjadi suatu persoalan yang hampir ada di seluruh daerah di Indonesia.

Politisasi birokrasi merupakan sebuah istilah ketika pengaruh politik muncul dan masuk kedalam birokrasi. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Terdapat beragam hasil dan temuan yang dikaji oleh para ahli dalam penelitiannya yang membahas terkait masalah politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi di sini memiliki makna bahwa pejabat politik lebih dalam memanfaatkan wewenangnya lebih menekankan kepentingan mereka terhadap pejabat birokrasi dalam hal mutasi atau penempatan jabatan pada struktur pejabat birokrasi pemerintahan maupun pada penempatan lokasi ASN tersebut bekerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syaiful<sup>10</sup>, yang secara khusus membahas fenomena politisasi birokrasi yang terjadi di tingkat daerah menemukan bahwa sejalan dengan pemikiran dari Graham T. Allison yang membahas persoalan fenomena politisasi birokrasi, terdapat arena tawar-menawar politik yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih terhadap birokrasi dalam pemerintahan demi sebuah kepentingan pada pelaksanaan kontestasi politik di Sumatera Barat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Eko Prastyo Purnomo<sup>11</sup>, mengkaji tentang politik birokrasi yang kemudian dihubungkan dengan fenomena politisasi birokrasi yang terjadi di pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fenomena politisasi birokrasi dalam pemerintahan terjadi karena adanya faktor profesional yang masih lemah, sehingga sistem yang dijalankan lebih mengutamakan hubungan yang bersifat politik atau yang lebih dikenal dengan istilah *spoil system*.

Berikutnya, penelitian terkait dengan fenomena politisasi birokrasi yang dilakukan oleh Djoni Gunanto<sup>12</sup>. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas ASN merupakan suatu prinsip selalu menjadi kekhawatiran, ketidaknetralan ASN tersebut dan melakukan dukungannya kepada salah satu pasangan calon dapat menjadi alasan utama terjadinya tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia. Pertama, politisasi

<sup>10</sup> Syaiful. 2017. *Kontestasi Politik Dalam Birokrasi*. Padang: Erka.

<sup>11</sup> Eko Prastyo Purnomo, dkk. 2020. "Politik Mutasi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Kemunting*. Vol. 1 (2).

<sup>12</sup> Djoni Gunanto. 2020. "Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Indonesia". *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*. Vol. 1 (2).

secara terbuka. Kedua, politisasi setengah terbuka. Ketiga, politisasi secara tertutup. Hal ini tentu sangat mudah untuk dilakukan oleh kandidat incumbent atau petahana dengan memberi iming-iming janji akan diberi jabatan yang lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lia Agustina Sary<sup>13</sup>, Yunus<sup>14</sup>, dan Rizki Muharlin Rayadi<sup>15</sup> yang membahas mengenai fenomena politisasi birokrasi pada momen pemilihan kepala daerah dan pasca pemilihan kepala daerah. Penelitian mereka menunjukkan bahwa fenomena politisasi birokrasi yang terjadi pada proses pemilihan kepala daerah adalah berupa pengerahan PNS sebagai mesin politik yang digunakan oleh para calon kepala daerah yang bertarung di pemilihan kepala daerah dengan akses kekuasaan birokrasi. Tidak hanya itu saja, fenomena politisasi birokrasi juga terjadi pasca pemilihan kepala daerah berlangsung berupa pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, adanya komersialisasi jabatan, adanya politik transaksional atau politik balas jasa, dan marginalisasi baperjakat dalam mekanisme mutasi ASN.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terlihat bahwa pelaksanaan mutasi jabatan dalam lingkungan pemerintahan lebih

<sup>13</sup> Lia Agustina Sary. 2012. "Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010)". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

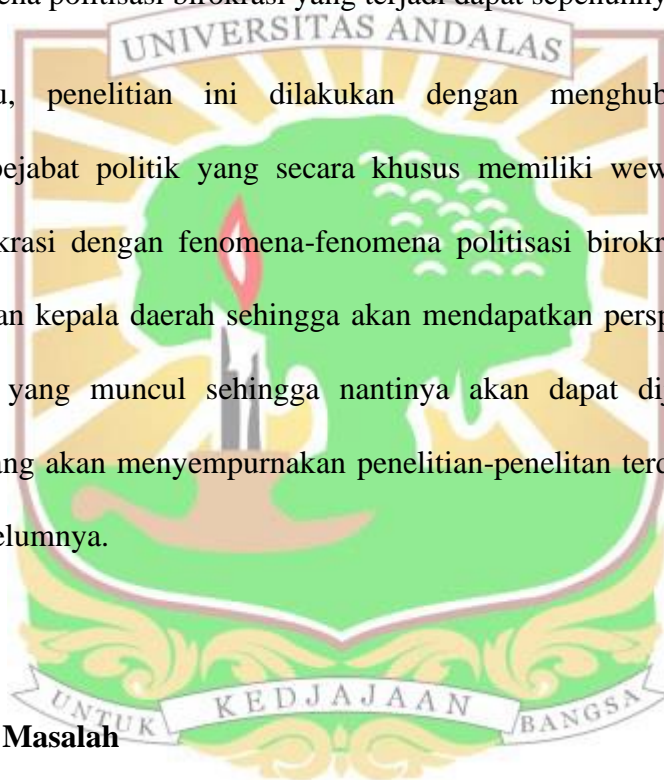
<sup>14</sup> Yunus. 2017. "Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara)". *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

<sup>15</sup> Rizki Muharlin Rayadi dan Erman. 2014. "Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 1 (1).



mengutamakan pada aspek prosedur dan teknis, serta melihatnya dari perspektif politisasi secara umum. Pelaksanaan mutasi jabatan dalam suatu lingkup pemerintahan pada dasarnya membutuhkan penerapan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, perspektif kepentingan pejabat politik yang secara khusus memiliki wewenang terhadap penataan pejabat birokrasi dalam pemerintahan juga perlu untuk dilihat agar penelitian terkait dengan fenomena politisasi birokrasi yang terjadi dapat sepenuhnya terjawab.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan antara kepentingan pejabat politik yang secara khusus memiliki wewenang terhadap penataan birokrasi dengan fenomena-fenomena politisasi birokrasi yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah sehingga akan mendapatkan perspektif yang baru dari masalah yang muncul sehingga nantinya akan dapat dijadikan sebagai kebaruan yang akan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya.



## 1.2 Rumusan Masalah

Politisasi birokrasi yang terjadi di pemerintahan daerah saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan berlakunya sistem desentralisasi dan sistem demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah. Bukan suatu rahasia lagi ketika ASN yang seharusnya netral dalam kontestasi politik pada demokrasi langsung tetapi malah berubah menjadi tempat berkompetisi untuk

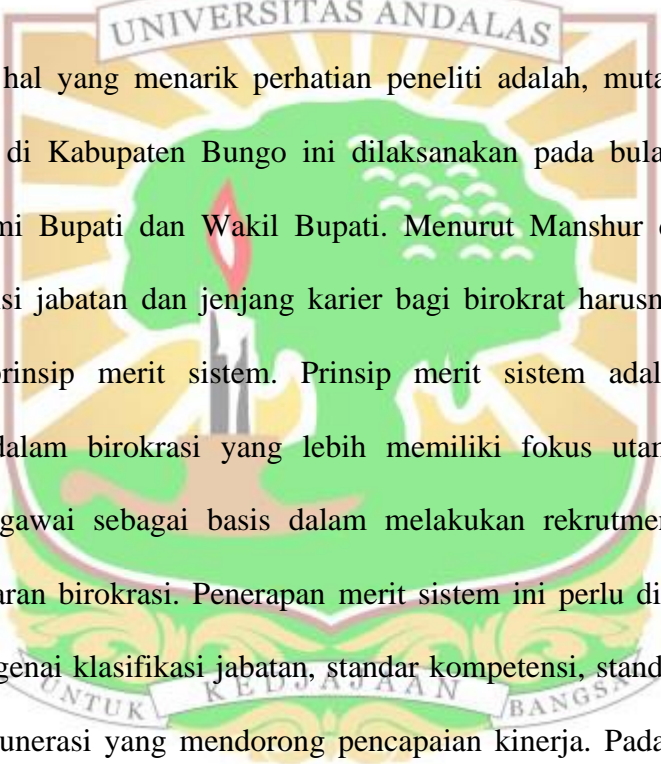
memberikan dukungan terhadap salah satu kandidat yang mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Ketika terjadi pergantian Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati, maka pergantian eksekutif birokrasi dibawahnya pasti akan selalu terjadi beriringan juga. Proses ini selalu terjadi setiap kali kepala daerah mengalami pergantian kepemimpinan. Pergantian eksekutif birokrasi atau yang lebih dikenal pada kalangan masyarakat umum dengan sebutan “Mutasi”, selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat, terutama kalangan birokrasi sendiri pasca dilantiknya seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah baru pada suatu provinsi atau kabupaten/kota.

Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca pemilihan kepala daerah juga terjadi pada pasca pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang masuk dalam daftar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 kemarin. Pemilihan kepala daerah tersebut diadakan untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo periode 2020-2025. Pemilihan kepala daerah tersebut diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu, pasangan calon Sudirman Zaini-Erick Muhammad Hendrizal nomor urut 1 dan pasangan Mashuri-Safrudin Dwi Apriyanto yang merupakan petahana dengan nomor urut 2.

Pemilihan kepala daerah tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan petahana Mashuri-Safrudin Dwi Apriyanto nomor urut 2. Selanjutnya, proses pelantikan diselenggarakan pada Senin 14 Juni 2021 di Aula Rumah Dinas

Gubernur Jambi<sup>16</sup>. Tiga bulan pasca pelantikan resmi tersebut, Bupati Bungo terpilih, Mashuri melakukan mutasi terhadap 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bungo. Perombakan tersebut dilakukan kepada staf di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengisi posisi kosong pada instansi lainnya. Akan tetapi, yang menarik perhatian masyarakat adalah staf tersebut dipindahkan pada penempatan di kecamatan-kecamatan yang jauh, seperti di Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Tanah Tumbuh, dan Kecamatan Bathin III Ulu.



Salah satu hal yang menarik perhatian peneliti adalah, mutasi yang terjadi pada 26 ASN di Kabupaten Bungo ini dilaksanakan pada bulan ketiga pasca pelantikan resmi Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Manshur dan Murtiadi<sup>17</sup>, penentuan posisi jabatan dan jenjang karier bagi birokrat harusnya berdasarkan pada prinsip-prinsip merit sistem. Prinsip merit sistem adalah manajemen kepegawaian dalam birokrasi yang lebih memiliki fokus utama pada aspek kompetensi pegawai sebagai basis dalam melakukan rekrutmen dan promosi pegawai di jajaran birokrasi. Penerapan merit sistem ini perlu didukung dengan kebijakan mengenai klasifikasi jabatan, standar kompetensi, standar kinerja, pola karier dan remunerasi yang mendorong pencapaian kinerja. Pada perspektif ini, maka diharapkan kedepannya reformasi politik dan birokrasi harus menjangkau pada upaya membatasi ruang gerak kekuasaan pejabat politik dan membangun

---

<sup>16</sup> Jambi Berita. 2021. "Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Bungo Resmi Dilantik, Ini Pesan Pj Gubernur Jambi". *Jambiberita.com*. Selengkapnya di <https://jamberita.com/read/2021/06/14/5967838/bupati-dan-wabup-terpilih-kabupaten-bungo-resmi-dilantik-ini-pesan-pj-gubernur-jambi/> diakses pada 22 Desember 2022 pukul 20.04 WIB.

<sup>17</sup> Sugiyanto. 2004. *Teori-Teori Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Penerbit: Rajawali Press.

kemandirian dan profesionalitas birokrasi pemerintahan. Sehingga nantinya tidak akan memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pejabat politik.

Menurut Syarkoni Syam, yang merupakan mantan Pimpinan DPRD Bungo dua periode (periode 2009-2019), dalam wawancaranya menyebutkan bahwa:<sup>18</sup>

“sebagian besar yang dimutasi ini merupakan keluarga dari tim yang tidak mendukung Bupati terpilih pada pilkada yang lalu, termasuk istri saya.”

Syarkoni Syam kemudian juga menduga pemindahan terhadap puluhan ASN ini merupakan bagian dari dendam politik beberapa waktu yang lalu.

Syarkoni kemudian juga menuding bahwa Bupati Bungo yang terpilih tidak mencerminkan sifat seorang pemimpin yang dewasa dalam berpolitik.

“Berarti memang tidak salah lagi kalau banyak orang yang mengatakan Bupati Bungo itu pendendam. ASN itu tidak ikut terlibat dalam politik pak, yang ikut politik itu kami. Siap-siap saja akan ada mutasi besar-besaran.”

Akan tetapi, hal tersebut tentu saja dibantah oleh kepala badan BKPSDMD Bungo, Wahyu Sarjono membantah bahwa mutasi terhadap puluhan ASN tersebut atas dasar adanya dendam politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2020 yang lalu. Wahyu menyebutkan bahwa pemindahan terhadap ASN tersebut merupakan hak dari daerah sendiri. Pemindahan tersebut merupakan sebuah bentuk dari penyegaran dan pengisian posisi yang kosong disebuah instansi saja. Kemudian Wahyu juga menyebutkan alasan lain bahwa sudah lima tahun Kabupaten Bungo tidak lagi menerima ASN Administrasi,

<sup>18</sup> Mr. Azronisbs. 2021. “Per 1 September, Puluhan ASN Dimutasi, Salah Satunya Istri Mantan Pimpinan DPRD Bungo”. *Suarabutesarko.com*. Selengkapnya di <https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/per-1-september-puluhan-asn-dimutasi-salah-satunya-istri-mantan-pimpinan-dprd-bungo/> diakses pada 22 Desember 2022 pukul 20.12 WIB.

sementara ASN yang pensiun sudah banyak yang mengakibatkan terjadinya banyak kekurangan di staf administrasi beberapa perangkat daerah<sup>19</sup>.

Salah satu perspektif mengenai pembahasan politisasi birokrasi adalah dari Barbara Geddes yang merupakan ilmuwan politik Amerika. Geddes mengkaji persoalan politik birokrasi yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Dalam penelitiannya Geddes mencoba mengungkapkan keniscayaan birokrasi dalam pemerintahan dari sudut pandang kepentingan politisi terhadap birokrasi.

Menurut Barbara Geddes<sup>20</sup> (1993), yang menggunakan kerangka teori rasional (*rational theory*), ketika seorang terpilih di puncak kekuasaan eksekutif ada tiga hal atau kepentingan yang akan ia lakukan. *Pertama*, memastikan bahwa ia akan bertahan setidaknya dalam periode kepemimpinannya (*Current Survival*). *Kedua*, menciptakan mesin politik yang loyal dan akan mendukungnya (*Creation of loyal political machine*). *Ketiga*, menciptakan pemerintahan yang efektif (*Effective Government*). Pemerintahan yang efektif berarti pemerintahan yang setidaknya mampu melakukan fungsi-fungsi dasarnya yakni pelayanan pada masyarakat regulasi dan fungsi kontrol.

Selain itu, tulisan dari Harold Seidman dalam Syaiful<sup>21</sup> mengenai *The Politics of Government Organization*, Ia menegaskan bahwa setiap politisi memiliki

<sup>19</sup> Metro Jambi. 2021. “Diduga Karena Masalah Politik, Bupati Bungo Mutasi Puluhan ASN”. *Metrojambi.com*. Selengkapnya di <https://www.metrojambi.com/read/2021/08/22/65604/diduga-karena-masalah-politik-bupati-bungo-mutasi-puluhan-asn/> diakses pada 22 Desember 2022 pukul 20.13 WIB.

<sup>20</sup> Amalinda Saairani. 2007. “Dilema Para Politisi di Tingkat Lokal: Antara Mimpi Inovasi dan Demokrasi (Kajian tentang Dilema Politisi Eksekutif di Kabupaten Bantul dan Jembrana)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11 (1) hlm. 93-118.

<sup>21</sup> Syaiful. *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

sebuah kepentingan pada penataan organisasi/lembaga dalam pemerintahan. Pertimbangan politik tidak pernah lepas dari setiap keputusan penempatan pejabat dalam struktur pemerintahan yang juga berdasarkan pertimbangan tertentu.

Kepentingan politik kemudian lebih dominan dalam setiap proses mutasi yang terjadi dan kemudian regulasi menjadi terabaikan begitu saja. Hal ini terjadi karena calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus membayar ongkos politik yang sangat mahal. Hal tersebut hanya mungkin bisa diperoleh apabila mereka mampu memanfaatkan potensi kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan pencarian dukungan dari birokrasi pemerintahan.

Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk menjelaskan apakah proses mutasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih tersebut merupakan bentuk politisasi birokrasi dan juga apakah perombakan birokrasi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih Kabupaten Bungo tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perundang-undangan atau apakah memang terbukti adanya kepentingan politik yang menjadi penyebab terjadinya perombakan birokrasi.

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa mutasi ASN yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2020 merupakan salah satu bentuk fenomena politisasi birokrasi dan terdapat kepentingan Bupati Bungo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memanfaatkan wewenangnya terhadap birokrasi dengan melakukan mutasi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo.

Pada saat proses suatu distribusi sumber daya manusia tidak berdasarkan pada prinsip dan lebih mengarah kepada pendapatan politik, maka hal tersebut akan membawa kerugian yang sifatnya tidak hanya materi saja, akan tetapi juga immateri. Dalam organisasi birokrasi pemerintahan, hal tersebut adalah pribadi individu dan unsur-unsur sumber daya manusia lainnya. Dampaknya juga akan dirasakan pada kinerja organisasi pemerintah daerah yang semakin tidak efektif akibat dari salah mengelola dalam penataan SDM aparatur pada formasi jabatan yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan masalah diatas, dan berangkat dari asumsi peneliti maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apa kepentingan kepala daerah dalam melakukan mutasi ASN dalam politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2020?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan kepala daerah dalam melakukan mutasi ASN dalam politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengembangan terhadap konsep, teori, dan landasan wacana dalam konteks memahami kepentingan kepala daerah dalam melakukan politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah secara ilmiah di bidang Ilmu Politik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan saran pemikiran secara ilmiah kepada para perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Bungo dalam Penyelenggaraan Pemilhan Kepala Daerah, khususnya dalam bidang Kepegawaian Daerah.

